

ANALISIS DETERMINAN YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (STUDI EMPIRIS PADA BPKAD KABUPATEN SORONG)

Frendy Gerson Simon Aroy^{1*}, Syaikhul Falah², Maylen K.P. Kambuaya³

^{1*23} Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Cenderawasih

Abstract

This study aims to analyze the determinant factors that affect the quality of financial statements at the Regional Financial and Assets Management Agency (BPKAD) of Sorong Regency. The factors tested in this study include human resource competence, internal control system, and the utilization of information technology. This research is a quantitative study. The population of this study covers all employees at BPKAD Sorong Regency, totaling 55 employees. The sampling technique used was purposive sampling with the criteria of Civil Servants (ASN) or Non-ASN who possess a minimum of Bachelor's degree (S1) education and have worked for at least 2 years, resulting in 46 eligible respondents. Primary data collection was conducted by distributing structured questionnaires using a 1–5 Likert scale. The analysis tool utilized to test the hypothesis was multiple linear regression analysis facilitated by SPSS 21. The results of this study show that human resource competence, internal control system, and information technology have a positive and significant effect partially on the quality of financial statements at BPKAD Sorong Regency. Simultaneously, these three variables contribute 48% to the variation in the quality of financial statements, while the remaining 52% is explained by other variables outside the scope of this study.

Keywords: *Quality of Financial Statements, Human Resource Competence, Internal Control System, Information Technology.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor determinan yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sorong. Faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini meliputi kompetensi sumber daya manusia (SDM), sistem pengendalian internal (SPI), dan pemanfaatan teknologi informasi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Populasi penelitian ini mencakup seluruh pegawai pada BPKAD Kabupaten Sorong sebanyak 55 pegawai. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Non-ASN yang memiliki pendidikan minimal Strata 1 (S1) dan telah bekerja minimal selama 2 tahun, sehingga diperoleh 46 responden yang memenuhi syarat. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner terstruktur dengan skala Likert 1–5. Alat analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda berbantuan program SPSS 21. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, dan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pada BPKAD Kabupaten Sorong. Secara simultan, ketiga variabel tersebut memberikan kontribusi sebesar 48% terhadap variasi kualitas laporan

keuangan, sedangkan sisanya sebesar 52% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

Kata Kunci: Kualitas Laporan Keuangan, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, Teknologi Informasi.

Pendahuluan

Kualitas laporan keuangan merupakan ukuran mutlak bagi instansi pemerintah untuk menunjukkan seberapa baik kinerja dan kondisi fiskal daerah disajikan secara jujur, transparan, relevan, serta sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan keuangan yang andal tidak sekadar memenuhi kewajiban administratif, namun menjadi fondasi pengambilan keputusan strategis yang berdaya guna dalam pembangunan daerah serta membangun kepercayaan publik terhadap akuntabilitas kepemimpinan daerah. Karakteristik normatif laporan keuangan pemerintah—yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami—menjadi prasyarat mutlak yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Meskipun tuntutan akuntabilitas ini bersifat universal, pelaksanaannya pada tingkat Pemerintah Daerah seringkali menghadapi tantangan struktural yang signifikan. Fenomena menarik sekaligus kritis terjadi di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Berdasarkan laporan BPK RI, kualitas pelaporan keuangan di Kabupaten Sorong mengalami penurunan yang sangat drastis dan memprihatinkan pada tahun anggaran 2023. Fenomena kegagalan ini dapat diamati secara jelas dari fluktuasi opini audit yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Sorong dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2019–2023).

Tabel 1. Opini Audit BPK atas LKPD Kabupaten Sorong 2019-2023

Tahun	Opini Audit BPK
2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2021	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2022	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2023	Tidak Wajar (TW)

Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I, BPK RI (2024)

Berdasarkan data Tabel 1, terlihat bahwa Pemerintah Kabupaten Sorong secara konsisten mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari tahun 2019 hingga 2022. Namun, pada tahun 2023, terjadi kejatuhan yang sangat fatal dan drastis di mana opini LKPD merosot langsung menjadi Tidak Wajar (TW). Penurunan kualitatif ini dikonfirmasi oleh temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI tahun 2023 yang menyingkap adanya kebocoran keuangan serta ketidakpatuhan masif terhadap tata kelola anggaran. Total penyimpangan keuangan yang diidentifikasi oleh BPK mencapai nominal fantastis yaitu sebesar Rp 60,26 miliar.

Kerugian daerah ini berakar dari berbagai penyimpangan di berbagai dinas atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas (termasuk kasus perjalanan dinas ganda), pengadaan barang dan jasa yang menyimpang dari spesifikasi kontrak, kekurangan volume pekerjaan fisik, pembayaran honorarium ganda, serta realisasi belanja modal yang tidak sesuai atau melebihi kebutuhan. Fenomena ini mengindikasikan adanya kelemahan mendasar dalam tata kelola internal, pengawasan staf, dan kompetensi dalam

pertanggungjawaban anggaran yang secara langsung berdampak buruk pada tingkat keandalan data pelaporan keuangan yang disajikan oleh BPKAD Kabupaten Sorong.

Sebagai garda terdepan manajemen aset dan anggaran di tingkat kabupaten, BPKAD memiliki andil besar dalam memformulasikan, merekam, mengonsolidasikan, dan melaporkan seluruh aktivitas akuntansi daerah. Kegagalan pelaporan keuangan pada tahun 2023 ini menuntut kajian ilmiah yang mendalam guna menganalisis faktor-faktor penentu kualitas laporan keuangan tersebut. Penelitian ini mereplikasi penelitian terdahulu oleh Wulandari et al. (2021) di Kabupaten Dompu, dengan memfokuskan analisis di Kabupaten Sorong pada tahun 2024 guna menelaah bagaimana pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, dan Teknologi Informasi dalam memulihkan kembali kualitas laporan keuangan Kabupaten Sorong.

Kajian Pustaka

Stewardship Theory

Teori Keagenan konvensional memandang relasi organisasi sebagai konflik kepentingan yang konfliktual, namun *Stewardship Theory* (Teori Kepengurusan) yang dikembangkan oleh Donaldson & Davis (1991) serta Davis, Schoorman, & Donaldson (1997) menawarkan paradigma alternatif yang sangat relevan untuk organisasi sektor publik. Teori *stewardship* menempatkan manajemen (dalam konteks ini, Pemerintah Daerah/BPKAD) bukan sebagai agen yang mementingkan diri sendiri (*self-serving*), melainkan sebagai *steward* (pengurus) yang perilakunya ditujukan untuk kepentingan bersama, memiliki perilaku kolektivistik, dan utilitas organisasi yang tinggi. Para pengurus ini termotivasi untuk bertindak sesuai dengan sasaran utama prinsipal (masyarakat dan lembaga penguasa).

Kaitannya dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sangat erat. Pemerintah sebagai *steward* memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menyajikan informasi keuangan yang jujur, transparan, dan akurat (berkualitas) kepada masyarakat serta pemerintah pusat yang bertindak sebagai prinsipal (Raharjo, 2007b; Cherina, 2018). Dengan menyajikan laporan keuangan yang andal, *steward* mengonfirmasi tanggung jawab pengelolaan sumber daya publik secara transparan, yang pada gilirannya akan meminimalisasi penyimpangan anggaran serta menghindari sanksi opini Tidak Wajar dari BPK RI.

Teori Decision-Usefulness

Teori *Decision Usefulness* menekankan bahwa kegunaan utama dari pelaporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang relevan dan andal yang berguna bagi pengguna eksternal maupun internal dalam proses pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Dalam konteks sektor publik, laporan keuangan harus menyajikan data terperinci yang memungkinkan masyarakat mengevaluasi kinerja operasional pemerintah daerah, memproyeksikan arus kas, serta mendeteksi secara dini risiko fiskal (Bastian, 2007). Informasi yang disajikan tidak boleh sekadar mematuhi aspek formalitas regulasi akuntansi saja, melainkan harus secara substantif mencerminkan realitas penggunaan dana publik sehingga memiliki *feedback value* (nilai umpan balik) dan *predictive value* (nilai prediktif) yang tinggi.

Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang disajikan harus memenuhi empat karakteristik kualitatif normatif agar dikategorikan berkualitas:

1. Relevan: Mampu mempengaruhi keputusan ekonomi dengan menyediakan umpan balik (*feedback*), prediksi kejadian masa depan, ketepatan waktu penyajian, serta kelengkapan informasi.
2. Andal: Bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menggambarkan realitas transaksi secara jujur (*honest representation*), netral, serta dapat diverifikasi (*verifiable*).
3. Dapat Dibandingkan: Laporan keuangan disusun secara konsisten dari tahun ke tahun sehingga perkembangan fiskal dapat diperbandingkan secara runtut baik secara internal (lintas waktu) maupun eksternal (antar pemerintah daerah).
4. Dapat Dipahami: Informasi keuangan disajikan dengan struktur sistematis dan terminologi yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kapasitas atau kompetensi sumber daya manusia adalah kapasitas seorang individu atau suatu sistem dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan yang diinginkan (Ernawati & Budiyo, 2019). Dalam pengelolaan keuangan daerah, ketersediaan staf akuntansi yang kompeten sangat krusial. Pegawai dengan latar belakang pendidikan yang sesuai, pemahaman mendalam terhadap regulasi akuntansi sektor publik, serta keterlibatan aktif dalam pelatihan/bimtek akuntansi akan meminimalkan kesalahan pencatatan transaksi (*human error*) serta mampu mematuhi standar prosedur pertanggungjawaban dana secara ketat (Evicahyani & Setiawina, 2015).

Sistem Pengendalian Internal

Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 1, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Mirosea et al., 2022). Pengendalian internal yang tangguh mencakup lima dimensi fungsional: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan yang dilaksanakan secara terstruktur dan berkelanjutan.

Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi mengacu pada integrasi perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan internet dalam mengolah data keuangan daerah secara otomatis, mulai dari input jurnal transaksi hingga visualisasi laporan akhir (Geovannie et al., 2016). Di era pemerintahan digital, proses manual sudah tidak lagi memadai dan sangat rentan terhadap kesalahan rekam data. Penggunaan teknologi informasi secara bijak, seperti aplikasi Financial Management Information System (FMIS) yang dikembangkan oleh BPKP, membantu meningkatkan akurasi, kecepatan, dan pengamanan data transaksi dari manipulasi eksternal (Fauziyah, 2019; Sukarini & Dewi, 2018).

Rumusan Hipotesis

H1: SDM yang dibekali pemahaman mendalam mengenai standar akuntansi pemerintah dapat menyusun laporan keuangan yang akurat, meminimalkan salah saji, serta mencegah terjadinya kekeliruan penganggaran. Penelitian terdahulu (Hombing et al., 2020; Siahay et al., 2023;

Suwarno et al., 2023) mengonfirmasi hubungan positif antara kompetensi SDM dan kualitas pelaporan. Maka diajukan hipotesis pertama:

H1: Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

H2: SPI yang kuat berfungsi sebagai saringan pertahanan utama dalam mencegah terjadinya fraud (kecurangan) anggaran, belanja fiktif, kelebihan bayar, atau kebocoran dana transfer daerah. Ketika lingkungan pengendalian diciptakan secara kondusif, maka keandalan pelaporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan (Lestari & Dewi, 2020; Mokoginta et al., 2017). Maka diajukan:

H2: Sistem Pengendalian Internal (SPI) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

H3: Penerapan teknologi informasi memangkas birokrasi manual yang lambat dan rawan penyimpangan. Dengan sistem digital yang terintegrasi, seluruh transaksi dapat terekam secara realtime dan otomatis, meminimalisasi salah kalkulasi. Penelitian empiris (Fitriana et al., 2019; Ridzal et al., 2019) membuktikan kontribusi positif pemanfaatan TI terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Maka diajukan:

H3: Teknologi Informasi (TI) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan asosiatif kuantitatif yang mengkaji hubungan kausalitas antar variabel bebas terhadap variabel terikat. Lokasi penelitian ini adalah Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Waktu penelitian dilaksanakan pada tahun 2024 guna menangkap kondisi terkini pasca jatuhnya opini audit LKPD Kabupaten Sorong 2023.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai fungsional dan struktural yang aktif bekerja di BPKAD Kabupaten Sorong sebanyak 55 pegawai. Mengingat populasi yang relatif terbatas, teknik penentuan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan kriteria spesifik: pegawai berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Non-ASN, memiliki latar belakang pendidikan formal minimal Strata 1 (S1), serta memiliki masa kerja minimal selama 2 tahun pada BPKAD Kabupaten Sorong. Berdasarkan kriteria penyeleksian tersebut, diperoleh jumlah sampel akhir sebanyak 46 responden yang dinilai memiliki kompetensi dan kapasitas relevan untuk mengisi instrumen penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari pengisian kuesioner oleh responden. Kuesioner diukur dengan menggunakan skala Likert 5 poin (skala 1: Sangat Tidak Setuju hingga skala 5: Sangat Setuju). Operasionalisasi variabel bebas dan terikat dalam penelitian ini dirinci pada tabel berikut:

Tabel 2. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel	Definisi Operasional	Indikator Pengukuran	Skala
Kompetensi SDM (X1)	Kapasitas pegawai pengelola keuangan yang dibekali kecerdasan akademis, teknis,	1. Latar belakang pendidikan 2. Pemahaman aturan & standar 3. Keterampilan interaksi sistem	Likert (1-5)

	dan etika guna menyusun pelaporan secara akurat.	4. Pelatihan & Bimtek 5. Pengalaman kerja	
Sistem Pengendalian Internal (X2)	Prosedur pengawasan integral yang diterapkan terus-menerus guna mengamankan aset negara dan menjamin keandalan akuntansi.	1. Lingkungan pengendalian 2. Penilaian risiko 3. Kegiatan pengendalian 4. Informasi & Komunikasi 5. Pemantauan (Monitoring)	Likert (1-5)
Teknologi Informasi (X3)	Pemanfaatan sistem komputasi terintegrasi untuk pengumpulan, pengolahan, dan otomatisasi pelaporan keuangan daerah.	1. Pemanfaatan jaringan internet 2. Komputerisasi akuntansi transaksi 3. Integrasi software keuangan (FMIS)	Likert (1-5)
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	Tingkat keandalan pelaporan keuangan daerah dalam menyajikan informasi fiskal yang relevan, jujur, andal, dan dapat dipahami.	1. Relevansi (manfaat prediksi & feedback) 2. Keandalan (penyajian jujur, verifikasi, netral) 3. Komparabilitas (dapat dibandingkan) 4. Kejelasan (dapat dipahami)	Likert (1-5)

Alat analisis yang digunakan untuk memproses data primer kuesioner adalah IBM SPSS versi 21. Tahapan pengujian data mencakup: (a) Pengujian instrumen melalui Uji Validitas (metode korelasi Pearson Bivariate di mana item valid jika $r\text{-hitung} > r\text{-tabel } 0,2907$) dan Uji Reliabilitas (koefisien Cronbach's Alpha $> 0,60$). (b) Pengujian Asumsi Klasik yang terdiri dari Uji Normalitas (Kolmogorov-Smirnov Test dengan signifikansi $> 0,05$), Uji Multikolinearitas (Tolerance $> 0,10$ dan VIF < 10), serta Uji Heteroskedastisitas menggunakan analisis grafik Scatterplot. (c) Analisis Regresi Linear Berganda untuk memformulasikan arah hubungan variabel dengan model persamaan fungsional:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan: Y adalah Kualitas Laporan Keuangan; a adalah Konstanta; b_1 , b_2 , b_3 adalah Koefisien Regresi masing-masing variabel; X_1 adalah Kompetensi SDM; X_2 adalah Sistem Pengendalian Internal; X_3 adalah Teknologi Informasi; serta e adalah Standard Error (residual). Langkah akhir analisis adalah pengujian hipotesis parsial (Uji t) pada tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$) dan Uji Koefisien Determinasi (R^2) guna menakar kekuatan model dalam memprediksi perubahan variabel terikat.

Hasil Dan Pembahasan

Distribusi Pengembalian Kuesioner

Pengumpulan data primer dilakukan dengan menyebarkan kuesioner fisik kepada para pegawai di lingkungan BPKAD Kabupaten Sorong. Kuesioner didistribusikan secara penuh kepada seluruh populasi potensial yang memenuhi syarat purposive sampling. Hasil distribusi menunjukkan tingkat partisipasi yang sempurna (*Response Rate* = 100%), di mana dari 46 eksemplar kuesioner yang disebarkan kepada 46 calon responden, seluruhnya (100%) berhasil dikembalikan dalam kondisi lengkap, terisi penuh, serta layak untuk dimasukkan ke dalam tahapan pengolahan data statistik komputerisasi selanjutnya.

Profil Karakteristik Responden

Analisis demografi terhadap 46 responden BPKAD Kabupaten Sorong diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan formal terakhir, serta rumpun kelulusan akademis (Akuntansi vs Non-Akuntansi) yang dirinci pada Tabel 3:

Tabel 3. Profil Demografi Staf Responden BPKAD Kabupaten Sorong

Kategori Demografi	Klasifikasi	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Jenis Kelamin	Laki-Laki	20	43%
	Perempuan	26	57%
Tingkat Pendidikan	Strata 1 (S1)	33	72%
	Strata 2 (S2)	13	28%
Latar Kelulusan	Akuntansi	4	8%
	Non-Akuntansi	42	92%
Total Responden	Pegawai BPKAD	46	100%

Sumber: Data Primer Diolah (2024)

Berdasarkan profil Tabel 3, mayoritas responden berjenis kelamin perempuan sebesar 57% (26 pegawai). Dari segi tingkat pendidikan formal, seluruh responden telah mengantongi gelar akademis yang sangat memadai yaitu lulusan Sarjana S1 sebesar 72% (33 pegawai) dan bahkan Magister S2 mencapai 28% (13 pegawai). Namun, terdapat temuan kritis yang perlu digarisbawahi dalam latar belakang rumpun kelulusan. Mayoritas mutlak dari staf pengelola keuangan tersebut merupakan lulusan rumpun Non-Akuntansi yaitu sebanyak 92% (42 pegawai), sedangkan lulusan murni akuntansi hanya berjumlah 4 orang (8%). Kondisi ketidakseimbangan latar belakang keilmuan ini mengindikasikan adanya kesenjangan kompetensi akuntansi yang cukup dalam, yang menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi keterlambatan pemahaman regulasi teknis SAP dan kelemahan pencatatan pembukuan keuangan daerah di BPKAD.

Hasil Analisis Deskriptif Variabel

Analisis deskriptif dilakukan untuk mengevaluasi persepsi responden terhadap masing-masing indikator dalam variabel penelitian. Hasil rata-rata skor item pertanyaan dirinci sebagai berikut:

1. Variabel Kompetensi SDM (X1): Menunjukkan bahwa nilai rata-rata tertinggi terdapat pada item SDM5 (terkait penyediaan anggaran untuk pengadaan peralatan dan dukungan teknis bimbingan) sebesar 4,28. Rata-rata terendah terdapat pada item SDM1 (terkait pemenuhan kualifikasi staf akuntansi dengan minimal pendidikan diploma/sarjana akuntansi) sebesar 4,00. Hal ini sejalan dengan data demografi di mana porsi kelulusan akuntansi murni di BPKAD memang sangat minim.
2. Variabel Sistem Pengendalian Internal (X2): Nilai rata-rata tertinggi dicapai oleh item SPI1 (pimpinan menetapkan kode etik dan standar etika kerja pegawai) sebesar 4,60 dan SPI14 (saluran komunikasi dua arah yang terbuka berkelanjutan) sebesar 4,47. Sebaliknya, nilai rata-rata terendah berada pada item SPI7 (pimpinan melakukan tinjauan mendalam atas kelemahan kontrol internal) sebesar 4,00. Angka ini membenarkan bahwa pengawasan pimpinan masih longgar, sehingga rentan terjadi penyimpangan di tingkat dinas.
3. Variabel Teknologi Informasi (X3): Nilai rata-rata tertinggi berada pada item TI2 (proses akuntansi komputerisasi terintegrasi) sebesar 4,30, sedangkan rata-rata terendah berada pada item TI5 (kesesuaian fitur software keuangan dengan kebutuhan operasional) sebesar 3,97. BPKAD telah bermigrasi ke aplikasi FMIS BPKP, namun para pegawai masih beradaptasi dengan fitur-fiturnya.
4. Variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y): Rata-rata tertinggi dicapai oleh item KKL13 (tingkat kejelasan laporan keuangan sehingga dapat dipahami) sebesar 4,47. Sementara itu, skor rata-rata terendah berada pada item KKL8 (tingkat pemenuhan laporan keuangan terhadap seluruh kebutuhan informasi pengguna eksternal secara

komprehensif) sebesar 4,06, membuktikan kekecewaan atas jatuhnya opini BPK tahun 2023.

Hasil Pengujian Kualitas Data (Validitas dan Reliabilitas)

Sebelum dilakukan analisis regresi linear berganda, instrumen kuesioner diuji kualitasnya untuk menjamin keabsahan dan keandalannya. Pada tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ dan derajat bebas $df = n - 2$ ($46 - 2 = 44$), diperoleh nilai r -tabel rujukan sebesar 0,2907. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan dari variabel X_1 , X_2 , X_3 , dan Y memiliki nilai r -hitung korelasi Pearson bivariate yang jauh lebih besar dari 0,2907 dengan tingkat signifikansi $\text{Sig.} < 0,05$, sehingga seluruh item dinyatakan valid.

Hasil pengujian reliabilitas instrumen dengan kriteria Cronbach's Alpha $> 0,60$ disajikan secara komprehensif pada Tabel 4:

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penelitian

No	Variabel Penelitian	Cronbach's Alpha	Nilai Batas	Keterangan
1	Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_1)	0,893	0,60	Reliabel Sangat Kuat
2	Sistem Pengendalian Internal (X_2)	0,881	0,60	Reliabel Sangat Kuat
3	Teknologi Informasi (X_3)	0,842	0,60	Reliabel Kuat
4	Kualitas Laporan Keuangan (Y)	0,947	0,60	Reliabel Sangat Sempurna

Sumber: Hasil Output Pengolahan SPSS 21 (2024)

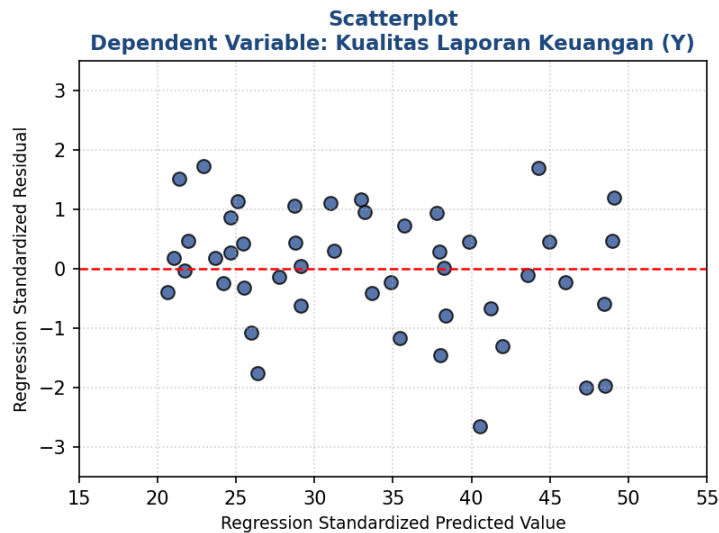
Berdasarkan rincian Tabel 4, seluruh variabel penelitian memiliki nilai koefisien keandalan Cronbach's Alpha yang berada jauh di atas ambang batas standar yaitu 0,60. Bahkan, variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y) mencapai nilai Cronbach's Alpha yang sangat sempurna sebesar 0,947, diikuti Kompetensi SDM (0,893). Hal ini membuktikan secara empiris bahwa instrumen kuesioner yang disebarkan memiliki tingkat konsistensi dan stabilitas internal yang sangat tinggi, sehingga sangat layak dan aman untuk digunakan sebagai alat ukur penelitian.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik dilakukan guna menjamin model regresi yang dibentuk memenuhi kriteria *Best Linear Unbiased Estimator (BLUE)*. Pengujian ini mencakup tiga jenis uji utama:

1. Uji Normalitas: Menggunakan uji statistik formal non-parametrik One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Hasil pengolahan data menghasilkan nilai signifikansi Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,845. Karena nilai signifikansi tersebut jauh lebih besar dari taraf nyata 0,05 ($0,845 > 0,05$), maka dapat ditarik simpulan bahwa nilai residual dari model regresi linear berganda terdistribusi secara normal dan memenuhi asumsi model.
2. Uji Multikolinearitas: Uji ini bertujuan mengevaluasi ada tidaknya hubungan korelasi linier yang kuat antar variabel bebas di dalam model regresi. Indikator deteksi menggunakan batas toleransi ($\text{Tolerance} > 0,10$) dan Variance Inflation Factor ($\text{VIF} < 10$). Hasil perhitungan menunjukkan: (1) Variabel Kompetensi SDM (X_1) memiliki nilai Tolerance 0,584 dan VIF 1,711; (2) Variabel Sistem Pengendalian Internal (X_2) memiliki nilai Tolerance 0,967 dan VIF 1,035; serta (3) Variabel Teknologi Informasi (X_3) memiliki nilai Tolerance 0,553 dan VIF 1,807. Seluruh variabel bebas memiliki nilai $\text{Tolerance} > 0,10$ dan $\text{VIF} < 10$, sehingga dinyatakan bersih dari gejala multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas: Dilakukan dengan metode visualisasi grafik Scatterplot residual. Berdasarkan Gambar 1, terlihat bahwa titik-titik data residual menyebar secara acak, tidak membentuk suatu pola geometris tertentu (tidak bergelombang, melebar, atau menyempit), serta tersebar merata di atas dan di bawah garis horizontal nol pada sumbu Y. Hal ini menegaskan bahwa tidak terdapat masalah heteroskedastisitas pada model regresi.



Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas Grafik Scatterplot

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda dan Uji Hipotesis (Uji t)

Pengujian pengaruh secara parsial (uji t) digunakan untuk membuktikan secara empiris keabsahan dari hipotesis H1, H2, dan H3 pada taraf signifikansi $\alpha = 0,05$ (tingkat kepercayaan 95%) dengan nilai t-tabel pembatas sebesar 2,016 ($df = 42$). Hasil pengujian statistik dirinci secara terperinci pada Tabel 5:

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda dan Uji t Parsial

Model Variabel	Koefisien Beta (B)	Std. Error	t-hitung	Signifikansi (Sig.)	Keputusan Hipotesis
(Constant)	1,205	0,803	1,501	0,141	-
Kompetensi SDM (X1)	0,450	0,087	5,160	0,000	H1 Diterima (Signifikan)
Sistem Pengendalian (X2)	0,280	0,084	3,326	0,001	H2 Diterima (Signifikan)
Teknologi Informasi (X3)	0,210	0,088	2,397	0,020	H3 Diterima (Signifikan)

Sumber: Hasil Output Analisis SPSS 21 (2024)

Berdasarkan nilai koefisien regresi pada Tabel 5, formula model regresi linier berganda dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = 1,205 + 0,450X1 + 0,280X2 + 0,210X3 + e$$

Persamaan regresi tersebut memberikan makna fisis sebagai berikut: (1) Konstanta bernilai positif sebesar 1,205 artinya jika variabel Kompetensi SDM, SPI, dan TI diasumsikan bernilai konstan atau nol, maka Kualitas Laporan Keuangan tetap bernilai positif 1,205 satuan skala Likert. (2) Koefisien regresi Kompetensi SDM (b_1) sebesar 0,450 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan variabel Kompetensi SDM sebesar satu satuan akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan sebesar 0,450 satuan dengan asumsi variabel bebas lainnya

konstan. (3) Koefisien regresi SPI (b2) sebesar 0,280 bermakna setiap peningkatan sistem pengendalian sebesar satu satuan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan sebesar 0,280 satuan. (4) Koefisien regresi TI (b3) sebesar 0,210 mengindikasikan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi sebesar satu satuan berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pelaporan keuangan sebesar 0,210 satuan.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Kekuatan model regresi dalam menjelaskan fluktuasi variabel Kualitas Laporan Keuangan diukur dari besaran nilai Adjusted R Square (Koefisien Determinasi) yang ditunjukkan pada Tabel 6:

Tabel 6. Hasil Analisis Koefisien Determinasi (Adjusted R Square)

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	0,718a	0,515	0,482

Sumber: Hasil Output Analisis SPSS 21 (2024)

Berdasarkan data Tabel 6, diperoleh nilai R (Korelasi) sebesar 0,718, yang menunjukkan adanya hubungan korelasi yang sangat kuat antara ketiga variabel bebas dengan Kualitas Laporan Keuangan. Nilai Adjusted R Square diperoleh sebesar 0,482. Hal ini bermakna bahwa kontribusi gabungan variabel Kompetensi SDM, Sistem Pengendalian Internal, dan Teknologi Informasi dalam menjelaskan perubahan kualitas laporan keuangan pada BPKAD Kabupaten Sorong adalah sebesar 48%. Sisanya sebesar 52% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian ini, seperti komitmen kepala daerah, kepatuhan regulasi, sanksi administrasi, atau kualitas pengawasan fungsional eksternal.

Pembahasan Hasil Penelitian dan Implikasi Kasus Opini Tidak Wajar

Penelitian ini menyajikan temuan mendasar yang dapat dijadikan rujukan pemulihan tata kelola keuangan daerah di Kabupaten Sorong pasca terjadinya penurunan drastis opini LKPD menjadi Tidak Wajar pada tahun 2023. Pembahasan mendalam terhadap masing-masing pengaruh variabel diuraikan di bawah ini:

Pengaruh Kompetensi SDM terhadap Kualitas Laporan Keuangan: Pengujian parsial membuktikan bahwa variabel Kompetensi SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan ($t\text{-hitung } 5,160 > 2,016$; Sig. $0,000 < 0,05$). Hasil ini mengonfirmasi hipotesis H1 diterima. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan kapasitas, pengetahuan, dan keterampilan pegawai di bidang akuntansi akan secara instan menaikkan kualitas pelaporan keuangan yang dihasilkan. Teori Stewardship menjelaskan bahwa pegawai yang kompeten dan termotivasi untuk mencapai tujuan bersama akan bekerja secara maksimal untuk meminimalkan human error dalam penjurnalan transaksi akuntansi daerah (Raharjo, 2007b). Di BPKAD Kabupaten Sorong, rendahnya kompetensi dasar akuntansi (di mana 92% staf berlatar belakang non-akuntansi) menjadi pemicu utama terjadinya kelemahan penyusunan laporan keuangan. Dukungan formal berupa pelatihan, bimtek intensif, serta penambahan pegawai berlatar belakang sarjana akuntansi merupakan langkah mendesak yang harus diambil.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan: Hasil pengujian parsial membuktikan bahwa variabel Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan ($t\text{-hitung } 3,326 > 2,016$; Sig. $0,001 < 0,05$), sehingga hipotesis H2 dinyatakan diterima. Pengendalian internal berfungsi sebagai sistem pertahanan berlapis (defense-in-depth) bagi aset dan anggaran pemerintah. Temuan ini

sangat krusial mengingat fakta runtuhnya opini LKPD Kabupaten Sorong 2023 disebabkan oleh penyimpangan senilai Rp 60,26 miliar yang sebagian besar bersumber dari kelemahan sistem pengawasan di dinas-dinas (seperti perjalanan dinas fanda, mark-up volume pekerjaan, dan honor ganda). Sesuai amanat PP 60 Tahun 2008, pimpinan daerah dan kepala BPKAD harus menegakkan disiplin, mengevaluasi secara ketat bukti pengeluaran, serta menindak tegas setiap kelemahan sistematis akuntansi. Pengendalian internal yang tangguh akan memperkecil peluang fraud serta memastikan kesesuaian seluruh aktivitas dengan regulasi (Mirosea et al., 2022).

Pengaruh Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan: Hasil pengolahan data membuktikan pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan ($t\text{-hitung } 2,397 > 2,016$; $\text{Sig. } 0,020 < 0,05$), yang berarti hipotesis H3 diterima. Integrasi teknologi informasi dalam penyusunan LKPD mutlak diperlukan untuk mereduksi kesalahan hitung manual serta memangkas birokrasi pertanggungjawaban yang berbelit. Dalam kaitan ini, BPKAD Kabupaten Sorong telah menggunakan aplikasi FMIS (Financial Management Information System) dari BPKP. FMIS terbukti membantu mengotomatisasikan penjurnalan, menyinkronkan data antar unit kerja, serta memfasilitasi audit trail oleh pengawas fungsional. Pemanfaatan TI ini harus didukung dengan peningkatan keahlian staf operasional serta jaminan keamanan jaringan digital agar data laporan keuangan terlindungi dari manipulasi (Fauziyah, 2019; Sukarini & Dewi, 2018).

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian kuantitatif ini berhasil merumuskan tiga kesimpulan utama mengenai faktor determinan kualitas pelaporan keuangan pada BPKAD Kabupaten Sorong. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada BPKAD Kabupaten Sorong. Sistem Pengendalian Internal (SPI) berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada BPKAD Kabupaten Sorong. Teknologi Informasi (TI) berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada BPKAD Kabupaten Sorong. Secara akumulatif, ketiga variabel tersebut memberikan pengaruh sebesar 48% terhadap Kualitas Laporan Keuangan, sedangkan sisanya sebesar 52% dipengaruhi oleh faktor lain. Temuan ini menegaskan pentingnya perbaikan kualitas SDM, penguatan sistem kontrol internal pemerintah daerah, serta optimalisasi teknologi informasi guna memulihkan kembali opini LKPD Kabupaten Sorong dari opini Tidak Wajar menjadi Wajar Tanpa Pengecualian di masa mendatang.

Disarankan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong (khususnya BPKAD) Disarankan untuk segera mengatasi kesenjangan kelulusan rumpun non-akuntansi melalui program beasiswa pendidikan formal lanjutan (Strata 2 Akuntansi), menyelenggarakan bimbingan teknis (bimtek) akuntansi sektor publik secara berkala, serta melakukan rekrutmen pegawai baru yang berlatar belakang akuntansi murni. Selain itu, pimpinan BPKAD harus meningkatkan disiplin pengawasan, mematuhi rekomendasi perbaikan BPK/Inspektorat, dan memaksimalkan fitur kontrol transaksi pada aplikasi FMIS BPKP guna menutup celah kebocoran anggaran. Bagi Peneliti Selanjutnya, Diharapkan dapat memperluas model penelitian ini dengan menyertakan variabel-variabel intervensi atau moderasi yang relevan (seperti komitmen kepala daerah, independensi pengawasan internal, atau sanksi administratif), atau memperluas objek penelitian pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayah Provinsi Papua Barat Daya.

Daftar Pustaka

- Andini, D., & Yusrawati. (2015). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akutansi*, 24(Juni 2015), 65–82.
- Bastian, I. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Erlangga.
- Cherina, J. (2018). *Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang [Politeknik Negeri Sriwijaya]*.
- Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, R. (1997). Toward Stewardship Theory of Management. *Academy of Management Review*, 22(1), 20–47.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49-64.
- Ernawati, F. Y., & Budiyo, R. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Tehnologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Rumah Sakit Umum Di Kabupaten Blora. *MALA'BI: Jurnal Manajemen Ekonomi STIE Yapman Majene*, 1(2), 80–85.
- Evicahyani, S. I., & Setiawina, N. D. (2015). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 5(3), 1–26.
- Fathia, N., Tanjung, A. R., & Indrawati, N. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating. *Pekbis Jurnal*, 12(1), 39–54.
- Fauziyah, S. (2019). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3(2).
- Fitriana, A. N. R. A., Widarno, B., & Harimurti, F. (2019). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah (Studi Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo). *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 15(4).
- Geovannie, P., et al. (2016). Kesesuaian Tugas-Teknologi dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Pegawai Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(1).
- Ghozali, I. (2006). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate IBM SPSS 23*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2020). *25 Teori Besar Ilmu Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*. Yoga Pratama.
- Hombing, A. K. B., Pandiangan, R. R., Simangunsong, D., & Malau, Y. N. (2020). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Pemerintahan Kota Medan. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 15(2).
- Lestari, N. L. W. T., & Dewi, N. N. S. R. T. (2020). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 11(2).
- Mirosea, N., et al. (2022). Peranan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Sektor Publik. *Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1).
- Mokoginta, N., Lambey, L., & Pontoh, W. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2).

-
- Priyanda, R., et al. (2022). Metodologi Penelitian Kuantitatif. Pradina Pustaka.
- Raharjo, E. (2007a). Teori Agensi dan Teori Stewardship dalam Perspektif Akuntansi. *The Management of Intellectual Property*, 40–65.
- Raharjo, E. (2007b). Teori Agensi Dan Teori Stewardship Dalam Perspektif Akuntansi. *Fokus Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 2(1).
- Ridzal, N. A., Sujana, I. W., & Malik, E. (2019). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan. *Owner*, 3(1).
- Siahay, A. Z. D., Salle, H. T., & Afdal, I. (2023). Determinants of Financial Reports Quality in the Regional Government of Jayapura City. *Journal of International Conference Proceedings*, 6(5).
- Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta.
- Sukarini, N. K., & Dewi, N. P. (2018). Pemanfaatan Teknologi Informasi, Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi, dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 23(2).
- Suwarno, S., Lustrilanang, P., & Sunardi, S. (2023). Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan Sistem Akuntansi Desa, Dan Komitmen Pimpinan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 11(1), 177–186.
- Watopa, M. A., Kambu, A. A., & Ngutra, R. N. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Moderasi. *Universitas Cenderawasih*.
- Wulandari, A., Mahmud, M., & Ramadhan, M. S. (2021). Analisis Determinan yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada BPKAD Kabupaten Dompu). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(1).